

**IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA SARAPATANGUNA
DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
DI KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
(The Implementation of Culture Values of *Sarapatanguna* in Government
Leadership in Baubau City, Southeast of Sulawesi)

Ishak Bagea

**Universitas Muhammadiyah Kendari
Jalan Ahmad Dahlan 10, Kendari, Indonesia**

Pos-el: ishak_bagea@yahoo.com

(Diterima: 20 Juni 2016; Direvisi: 26 Agustus 2016; Disetujui: 16 Oktober 2016)

Abstract

This research aimed to describe the implementation of culture values sarapatanguna in government leadership at Baubau city, Southeast Sulawesi. This research used qualitative method. Technique of data collection was done through observation, interview and documentation study. The result of the research shows that the implementation of culture values of sarapatanguna in government leadership at Baubau city, Southeast Sulawesi namely: (1) in Baubau city, culture values of shame has been implemented through poma-maeaka expression; (2) in Baubau city, culture values of protecting or taking care of each other has been implemented through popia-piara expression; (3) in Baubau city, culture values of loving each other has been implemented through poma-masiaka expression; (4) in Baubau city, culture values of appreciating each other has been implemented through poangka-angkataka expression. It is concluded that culture values of sarapatanguna had been implemented in their daily life and in government leadership at Baubau city, Southeast Sulawesi, thereby atmosphere of harmonic, safe, peaceful and peace were established well.

Keywords: *implementation, culture values of sarapatanguna, leadership*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai budaya sarapatanguna dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai budaya sarapatanguna dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: 1) di Kota Baubau telah diimplementasikan nilai-nilai budaya malu melalui ungkapan poma-maeaka, 2) di Kota Baubau telah diimplementasikan nilai-nilai budaya saling memelihara melalui ungkapan popia-piara, 3) di Kota Baubau telah diimplementasikan nilai-nilai budaya saling menyayangi melalui ungkapan poma-masiaka, serta 4) di Kota Baubau telah diimplementasikan nilai-nilai budaya saling menghargai melalui ungkapan poangka-angkataka. Nilai-nilai budaya sarapatanguna tersebut telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta telah diimplementasikan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tercipta suasana harmonis, aman, tenang dan damai.

Kata-kata kunci: *implementasi, nilai budaya sarapatanguna, kepemimpinan*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Fakta ini tercermin dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sebagian besar pemimpinnya. Masyarakat kehilangan figur kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam menyelenggarakan kepemimpinan, baik di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, hingga agama. Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme telah mencederai figur pemimpin teladan di tubuh lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seharusnya berperan sebagai pengemban amanah rakyat. Sikap, perilaku, dan perbuatan yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah serta di berbagai lembaga negara dan pemerintahan harus dilandasi oleh moral dan etika. Namun, realitanya masih ada sebagian pelaksana dan penyelenggara negara dan pemerintahan yang menunjukkan sikap dan perilaku bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Kondisi ini digambarkan oleh sastrawan Taufik Ismail dalam puisi berjudul *Kami Muak dan Bosan*.

Kondisi yang digambarkan Taufik Ismail memunculkan sikap keprihatinan dan sekaligus kekhawatiran terhadap penyimpangan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di era reformasi pemerintah daerah bertekad membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi data dan fakta menunjukkan bahwa KKN malah lebih merata dan meluas daripada era orde baru. Salah satu ciri krisis kepemimpinan di Indonesia adalah

tidak ada pemimpin yang kuat sejak lengsernya pemerintahan orde baru. Reformasi yang digulirkan mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat pascapemerintahan orde baru belum mampu menghilangkan krisis kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputerisasi, dan transportasi. Dampak perkembangan telah menyebabkan sekat-sekat yang membatasi interaksi antara manusia semakin berkurang. Kondisi ini berimplikasi sangat luas pada aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi. Kepemimpinan pemerintahan dan politik yang kuat belum tampak dalam membawa bangsa Indonesia bekiprah dalam persaingan antara bangsa di berbagai bidang.

Pemerintahan yang berorientasi pada kebudayaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) masih jarang. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis kepemimpinan di Indonesia adalah revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Revolusi mental mempunyai tujuan mulia untuk mengatasi kerusakan mental masyarakat Indonesia yang melakukan KKN. Diharapkan semua daerah di Indonesia menggali kembali kearifan lokalnya, seperti halnya di Kota Baubau. Pemimpin pemerintahan harus menggali kembali budaya lokal *sarapatanguna*, terutama dalam tata kelola pemerintahan untuk menemukan kembali 'kearifan lokal' yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam membangun peradaban bangsa. Kedudukan nilai-nilai budaya *sarapatanguna* sebagai pandangan hidup masyarakat Baubau mengandung arti bahwa budaya

sarapatanguna merupakan pedoman dan pegangan hidup serta penuntun sikap dan perilaku masyarakat Baubau dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai sumber nilai dan etika kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *sarapatanguna* perlu digali, diamalkan, sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, tertib, tenteram, dan damai.

Keberadaan *sarapatanguna* sebagai pedoman dan penuntun masyarakat Baubau dalam bersikap, dan bertingkah laku menarik untuk diteliti karena sangat mendasar, penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kota Baubau. Fenomena yang terjadi sekarang memperlihatkan nilai-nilai budaya kepemimpinan tergerus arus globalisasi. Hal ini ditandai dengan pergeseran nilai-nilai budaya terkait perilaku dan komitmen kepemimpinan untuk pembangunan budaya di Kota Baubau. Kepemimpinan sekarang lebih mementingkan diri sendiri dan berorientasi materi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis makalah penelitian yang berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Budaya *sarapatanguna* dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara". Rumusan masalah penelitian adalah: bagaimanakah implementasi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* dalam kepemimpinan pemerintahan di kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian yaitu untuk medeskripsikan implementasi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

LANDASAN TEORI

Nilai-Nilai Budaya

Kreitner (2008, hlm. 96) menyatakan bahwa nilai budaya adalah keyakinan dan nilai-nilai tentang bagaimana sebuah komunitas seharusnya dan sebenarnya bertindak. Jason Colquitt (2009, hlm. 441) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya didefinisikan sebagai keyakinan bersama tentang kondisi akhir atau cara bertindak yang diinginkan dalam sebuah budaya tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Gary Yulk (2006) berpendapat bahwa nilai-nilai budaya mungkin dimaksudkan oleh seorang yang tumbuh besar di budaya tertentu dan akan mempengaruhi tingkah laku dan perilaku mereka dalam sebuah cara yang tidak disadari (hlm 455).

Wagner dan Hollenbeck (2005) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya adalah tingkah laku dan persepsi bersama dalam sebuah organisasi yang didasarkan pada sekumpulan norma dan nilai fundamental dan membantu anggota-anggota untuk memahami organisasi. Nilai-nilai budaya yang kuat dalam budaya organisasi bisa saja konsisten atau tidak konsisten dengan nilai budaya yang dominan, khususnya jika sebuah organisasi adalah sub dari organisasi (hlm. 592).

Teori Kebudayaan

Pengertian budaya dalam bahasa Sansakerta bermakna *buddhayah*. Kata ini merupakan bentuk jamak dari *budi* atau *akal* (Koentjaraaningrat, 1985). Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai budi pekerti dari akal seorang manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya sering disebut *culture*. Kata *culture* ini berasal dari bahasa Latin yaitu *colere*. Budaya

mengandung bermacam pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat, serta sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Ndraha (1997, hlm. 45), merinci fungsi budaya sebagai berikut: (1) sebagai identitas dan citra suatu masyarakat, (2) sebagai pengikat suatu masyarakat, (3) sebagai sumber inspirasi kebanggaan dan sumber daya, (4) sebagai kekuatan penggerak, (5) sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah, (6) sebagai pola perilaku, (7) sebagai warisan, (8) sebagai formalisasi, (9) sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan, dan (10) sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuk *nation-state*.

Kebudayaan telah membentuk suatu keyakinan bahwa kebudayaan itu merupakan *blueprint* yang telah menjadi kompas dalam perjalanan hidup manusia, ia menjadi pedoman dalam tingkah laku. Pandangan semacam ini telah menyebabkan peneliti merunut keberlanjutan kebudayaan itu pada ekspresi simbolik individu dan kelompok, terutama untuk melihat bagaimana proses pewarisan nilai itu terjadi. seperti yang dibayangkan Clifford Geertz (1973, hlm. 89) menyatakan bahwa kebudayaan itu merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis. Geertz dalam Abdullah (2007, hlm. 1) juga mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap

kehidupan. Budaya merupakan kreasi manusia yang dimiliki dalam bentuk ide, gagasan, pandangan, harapan, cita-cita, dorongan, motivasi, serta sarana dan prasarana kehidupan. Semakin tinggi tingkat budaya suatu bangsa, dan bernilai tinggi, atau disebut peradaban menunjukkan keluhuran budi dan daya inovasi dalam mengisi ruang dan waktu dalam kehidupan manusia.

Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan merupakan suatu kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi, dan pengaruh terhadap masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik '*public service*' dan layanan sipil '*civil service*'. Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri atas dua subkonsep yang hubungannya satu dengan yang lain, tegang, yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan yang bersifat formal (Ndraha, 2003, hlm. 226; Effendy, 2009, hlm. 39).

Bennis & Nanus (2003) menyatakan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terikat oleh tataran hukum formal, namun ia juga bersandar pada sistem nilai sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari sistem nilai budaya yang dimiliki, termasuk kepercayaan dan adat istiadat. Konsep kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal bersumber pada kewenangan rasional yang dihadapkan pada berbagai tugas dan kewajiban serta tuntutan situasi dan perubahan yang cepat dan dituntut untuk berperan sesuai dengan status yang melekat

untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaannya (Effendy, 2009). Pemahaman di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan merupakan mata rantai yang sulit dipisahkan.

Pemerintah '*government*' berasal dari bahasa Yunani, *kubernao* yang berarti "untuk mengendalikan". Pemerintah atau merupakan sebuah organisasi, yang mempunyai kekuasaan politik. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat hukum dan undang-undang serta bertindak sebagai hakim, baik untuk permasalahan daerah maupun negara, dan memberi gagasan terhadap keputusan administratif (Ciulla, 2003). Suatu kota, kabupaten, provinsi atau negara dengan segala kompleksitasnya akan mempunyai perbedaan lapisan tingkat pemerintahan baik lokal, regional, dan nasional. Melalui pemahaman tersebut, pemerintahan memiliki berbagai variasi namun esensinya sama yaitu organisasi pemerintahan yang memiliki kekuasaan, kekuatan, dan kemandirian yang digerakan oleh perilaku organisasi.

Pemerintah memiliki empat unsur, yaitu: (1) ada dua pihak yang terkandung, (2) kedua pihak saling memiliki hubungan, (3) pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan (4) pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Konsep *trias politica* dari Montesquie membagi pemerintah dalam arti yang luas dalam tiga kekuasaan, yaitu: (1) kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), (2) kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutif), dan (3) kekuasaan mengadili (yudikatif).

Teori nilai-nilai budaya *sarapatanguna* dikaitkan dengan kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau sangat relevan dalam

penelitian ini. Kepemimpinan pemerintahan yang berorientasi kebudayaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, sangat strategis dan mempunyai tujuan mulia mengatasi kerusakan mental masyarakat. Berdasarkan penjelasan teori di atas, diharapkan semua daerah di Indonesia dapat menggali kembali kearifan lokalnya, seperti halnya di Kota Baubau. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa budaya lokal *sarapatanguna* mengandung kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam membangun peradaban bangsa (Turi, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain peneliti bermaksud mengembangkan konsep pemikiran, pemahaman dari pola yang terkandung dalam tema penelitian dan melihat secara keseluruhan suatu proses dan mendeskripsikannya secara induktif. Untuk memperoleh data yang sah dan absah, dilakukan kegiatan observasi dan wawancara dan pemeriksaan data dengan teknik triangulasi dan referensi yang memadai.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat Kota Baubau yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang tema penelitian, antara lain keturunan Sultan Buton, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, dan para pimpinan badan dan dinas pada pemerintahan Kota Baubau. Sumber data pendukung lainnya adalah Kitab Martabat Tujuh

yang pernah dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar pada masa kesultanan Buton.

Analisis data dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dari awal sampai akhir kegiatan penelitian melalui reduksi data, pengorganisasian data, pemeriksaan terhadap seluruh data, penafsiran dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

Implementasi *Sarapatanguna*

Implementasi *sarapatanguna* merupakan tahapan penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh para pelaksana atau aktor pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Baubau, sudah diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* dalam masyarakat Kota Baubau meliputi budaya malu melalui ungkapan *pomae-maeaka*; artinya malu melakukan hal yang tercela seperti KKN, budaya saling memelihara melalui ungkapan *popia-piara*, budaya saling menyayangi melalui ungkapan *poma-maasiaka*; dan budaya saling menghargai melalui ungkapan *poangka-angkataka*, sehingga tercipta suasana harmonis, aman, tentram dan damai.

Guru menghargai siswanya, orang tua menyayangi anaknya, dan pemimpin menghargai bawahannya. Bawahan yang berprestasi diberikan hadiah 'rewards', seperti kenaikan gaji dan diperhatikan secara berkala kenaikan pangkatnya. Sebaliknya bawahan yang melanggar diberikan sanksi 'punishment'. Sanksi yang

dijatuhkan dapat berupa penundaan kenaikan pangkat serta diberikan teguran secara lisan dan tertulis sehingga bawahan dapat memperbaiki kinerjanya.

Sarapatanguna

Sarapatanguna berasal dari bahasa Wolio Buton yang terdiri atas tiga kata, yaitu *sara*, *pata*, dan *angu*. *Sara* berarti norma, nilai, aturan, hukum, atau dapat juga berarti pemerintah yang memperoleh mandat dari rakyatnya untuk menjalankan aturan, menegakkan hukum dan undang-undang. *Pata* berarti empat. *Angu* artinya buah, macam, jenis, unsur, satuan dan sebagainya, serta akhiran *na* sebagai kata petunjuk. *Patanguna* berarti yang empat buah, macam, unsur. Jadi, *sarapatanguna* dapat diartikan norma, nilai yang empat yang harus dipatuhi, dipedomani, oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berketuhanan.

Secara substansi *sarapatanguna* mengandung nilai luhur yang dirumuskan oleh para pendiri Kesultanan Buton 'founding father' yang diformalkan dalam Kitab Murtabat Tujuh (Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton) untuk dijadikan pedoman, petunjuk, dan parameter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berketuhanan. Inilah sebabnya *sarapatanguna* dinyatakan sebagai landasan filsafat atau pandangan hidup masyarakat Buton. Rumusan nilai-nilai *sarapatanguna* itu tersusun secara cermat sempurna, dan lengkap. Sebagaimana *sarapatanguna* terdiri atas dua bagian, masing-masing bagiannya menyangkut dimensi yang berbeda.

Sarapatanguna bagian pertama menyangkut dimensi kemanusiaan atau kemasyarakatan yang mengandung filsafat *Binci-Binciki-Kuli* (terjemahan bebasnya: cubit-cubit kulit) terkandung maksud bahwa jika kita dicubit orang terasa sakit, maka jangan pula kita mencubit orang lain. Jadi, filsafat *binci-binciki-kuli* mengusung prinsip-prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini kemudian melebur dalam keempat nilai berikut.

Po-maa-maasiaka (saling sayang-menyayangi)

Po-pia-piara (saling pelihara-memelihara)

Po-mae-maeaka (saling menjaga rasa malu)

Po-angka-angkataka (saling mengangkat atau saling menghargai, dan saling menghormati)

Terjemahan arti kata-kata tersebut merupakan terjemahan bebas. Hakikat ungkapan tersebut dapat diperoleh dengan memberikan makna pada tiap kata dalam ungkapan tersebut. *Po-maa-maasiaka* berasal katanya “*maasi*”. Yang artinya: sayang, cinta, atau kasih). *Maasiaka*; artinya sayang terhadap sesuatu seseorang maa-masiaka. Frasa sayang menyayangi melibatkan orang banyak, kelompok, masyarakat. Awalan *po* mengandung makna saling berbalas sehingga tersirat makna adanya persamaan, kesetaraan dan keadilan dalam konteks sayang-menyayangi.

Sarapatanguna bagian kedua menyangkut dimensi kehidupan secara utuh yang dikaitkan dengan dimensi ketuhanan. Hal ini terlihat dari rumusan selengkapnya nilai-nilai *sarapatanguna* bagian kedua serta kandungan filsafat yang diusung yaitu *Poromu yinda saangu, pogaa yinda*

koolota. Kalimat ini bermakna “menyatu tidaklah satu, berpisah tiada antar.

Kausa prima *sarapatanguna* adalah “agama”. Adapun rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Ayinda-yindamo arata somanamo karo;

Ayinda-yindamo karo somanamo lipu

Ayinda-yindamo lipu somanamo sara

Ayinda-yindamo sara somanamo agama

Nilai-nilai dalam ungkapan tersebut ada empat, tetapi unsur-unsurnya ada lima yaitu *arataa*, *karo*, *lipu*, *sara*, dan *agama*. Terjemahan bebas ungkapan ini adalah *arataa*, artinya harta atau materi, *karo*, artinya diri, kedirian atau harga diri, *lipu*, artinya pulau, wilayah, negara atau wilayah Negara, *sara*, artinya norma, aturan, hukum, undang-undang, pemerintah yang berdaulat yang menegakkan undang-undang dan aturan, *agama* artinya wadah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta seru sekalian alam.

Bolimo arata somanamo karo merujuk pada penghormatan atas harkat martabat kedirian manusia yang tidak mungkin dan tidak boleh dipersamakan dengan nilai materi (*arata*). Betapapun harga diri manusia lebih utama daripada materi. *Bolimo karo somanamo lipu* mengisyaratkan pesan semangat. Cinta tanah air, cinta negara. Nilai ini merupakan cikal bakal konsep bela negara. Ketika kepentingan negara menghendaki maka kita siap tampil untuk membela negara, siap berkorban materi bahkan jiwa dan raga, untuk mempertahankan wilayah negara dari kemungkinan

adanya intervensi atau serangan pihak luar.

Bolimo lipu somanamo sara membawa pesan bahwa pemerintah yang berdaulat menjadi jaminan bagi eksistensi dan wibawah negara. Ketika wilayah negara dalam keadaan darurat akibat adanya intervensi pihak luar, pemerintah yang berdaulat dapat tampil sebagai representasi kedaulatan rakyat untuk mengamankan wibawah negara dan pemerintah. *Bolimo sara somanamo agama* mengusung pesan bahwa jika pemerintah (oknum-oknum pemerintah) banyak yang zalim, moralnya goyah dan mentalnya rusak (korupsi, narkoba, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain) maka berpeganglah kepada agama Allah sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan guna menciptakan suasana damai, tenang, tertib dan kondusif. Karena agama merupakan wadah bagi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta seru sekalian alam Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Nilai-Nilai Budaya Sarapatanguna

Nilai-nilai budaya sarapatanguna di kerajaan dan kesultanan Buton yaitu: *po-maa-maasiaka*, *po-pia-piara*, *po-mae-maeaaka*, *po-angka-angkataka*, dan “*bolimo karo somanamo lipu*” Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan petuah yang diperoleh dari hasil kajian sejarah panjang leluhur masyarakat Buton. Petuah tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dengan kalimat pendek sehingga mudah diingat oleh anak cucu mereka bahkan oleh seluruh masyarakat.

Po dalam ungkapan bermakna kesetaraan, perlakuan timbal balik yang seimbang antara beberapa pihak. Kata ini berulang di setiap penggalan

ungkapan yang menjelaskan dan mengindikasikan keterkaitan lebih dari seorang atau lebih dari satu pihak dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Po-maa-masiaka, artinya cinta kasih atau sayang terhadap sesuatu. Asal katanya *maasiaka* yang berarti sayang, cinta, kasih, sedangkan *maa-maasiaka* mengisyaratkan adanya pihak yang jamak sehingga menjadi kasih mengasihi, cinta-mencintai, sayang-menyayangi yang tentu melibatkan pihak-pihak lebih dari satu pihak. Peranan awalan kata *po* lebih menekankan pada pengertian kesetaraan, kesamaan derajat antara pihak-pihak tersebut. Penggalan ungkapan *po-maa-masiaka* adalah sayang-menyayangi, cinta mencintai antara sesama masyarakat secara timbal-balik dalam keadaan yang seimbang, setara, sederajat dan proporsional sesuai dengan konteks dan peranannya, serta kodrat masing-masing.

Asal kata *po-pia-piara*, adalah *piara* yang berarti piara, pelihara atau rawat. *Pia-piara* mengisyaratkan adanya pihak-pihak yang jamak sehingga menjadi saling memelihara, saling merawat, sudah barang tentu melibatkan pihak-pihak lebih dari satu pihak dalam konteks saling memelihara, saling merawat. Awalan kata *po* menekankan pada pemaknaan adanya kesetaraan, kesamaan derajat, dan keseimbangan peranan antara pihak-pihak yang berinteraksi secara timbal-balik, dengan demikian penggalan ungkapan *po-maa-maasiaka* berarti saling memelihara, saling asah, saling rawat sesuai konteksnya, dan menurut peranannya masing-masing.

Asal kata *po-mae-maeaaka*, adalah *maea* yang berarti malu atas sesuatu perbuatan tercela. *Mae-*

maeaaka mengisyaratkan sifat tahu diri, tahu malu, dan sadar diri. Sewaktu seorang pemimpin melakukan perbuatan tercela tentu orang-orang akan mencemooh, pemimpin ini akan merasa malu dan bahkan seluruh kerabat keluarga, orang tua, bahkan organisasi, komunitas, di mana orang itu berada akan terimbas kata malu atas perbuatan tercela tersebut. Rasa malu ini akan mencegah pemimpin untuk melakukan perbuatan tercela.

Awalan *po* berarti mengindikasikan adanya beberapa pihak yang berinteraksi setara, seimbang, dan memiliki kesamaan hak. Frasa *po-mae-maeaaka* tidak hanya mengindikasikan hak dan kewajiban seseorang, tetapi berlaku sama terhadap setiap individu dalam masyarakat. Semua anggota kelompok, seluruh anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik, wibawa, harga diri pribadi, dan kelompoknya. Dengan demikian orang akan enggan dan takut untuk melakukan perbuatan tercela. Mereka takut dan malu akan sanksi dan hujatan yang berasal dari masyarakat lingkungan, kelompok ataupun warga sekelilingnya.

Asal kata *po-angka-angkataka*, adalah *angka* yang berarti angkat, sedangkan *angkataka* artinya angkat ke atas lebih tinggi dari posisi orang yang mengangkat. *Angka-angkataka* berarti saling mengangkat lebih tinggi dari posisi pihak yang mengangkat di wilayah eks kerajaan dan kesultanan Buton yang berpusat di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Padanan kata *angka-angkataka* dalam bahasa Indonesia adalah harga menghargai. *Po-angka-angkataka* berarti adanya pihak-pihak yang menempati posisinya masing-masing. Posisi-posisi memiliki kesetaraan dalam harkat dan martabat. Selain itu, individu dalam posisi tersebut

mempunyai persamaan hak asasi untuk saling menghargai. Mereka diarahkan untuk melakukan perannya secara proporsional sesuai fungsinya. Pelaksanaan peran tersebut tidak melebihi batas kewajaran dan tatakrama dalam masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan organisasi, strategi menghargai pegawai juga harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Pemimpin sebaiknya mengingat bahwa dalam rangka memotivasi pegawai kadang-kadang seorang pemimpin harus memberikan penghargaan kepada pegawai, orang akan senang jika dihargai. Pemberian penghargaan berbeda strateginya dengan penyampaian teguran. Jika penyampaian teguran dilakukan secara tertutup, maka sebaliknya pemberian penghargaan dilakukan secara terbuka di depan umum. Hal ini akan menimbulkan dua dampak positif yaitu penerima penghargaan akan merasa bangga sehingga akan termotivasi lagi meningkatkan prestasinya. Sedangkan bagi teman-teman dalam organisasi dengan melihat bahwa prestasi seseorang itu dihargai oleh pimpinan, maka juga ikut termotivasi untuk melakukan tugas sebaik-baiknya.

Kata dasar *po-binci-binciki kuli*, a dalam Bahasa Indonesia berarti cubit. *Kuli* dalam Bahasa Indonesia berarti kulit. Jadi *binciki kuli* arti harfiahnya adalah cubit kulit. Kegiatan mencubit kulit akan menyebabkan rasa sakit. Perasaan yang ditimbulkan kegiatan pasti tidak enak.

Bolimo karo somanamo lipu, berarti utamakan tanah kerajaan, negara, umum, dari urusan pribadi. Kepentingan kerajaan dalam arti masyarakat secara umum harus didahulukan dibanding kepentingan pribadi. Ungkapan di atas sangat monumental karena kalau kita kaitkan

dengan zaman sekarang, ungkapan ini selalu terdapat dalam sumpah jabatan.

Kepemimpinan dengan falsafah *bhinci-bhinciki kuli* pada dasarnya telah termaktub dalam Kitab Martabat Tujuh sebagai dasar aturan kesultanan Buton. Falsafah *bhinci-bhinciki kuli* (saling mencubit kulit) telah dikembangkan oleh para ilmuwan (pemikir-pemikir) lokal di Buton pada zamannya. Falsafah ini lahir sebelum terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan di Buton. Walaupun sistem pemerintahan kesultanan pada saat itu sudah tidak berjalan secara formal di lingkungan masyarakat lokal, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mengakar dan melekat serta merasuk dalam lubuk hati sanubari masyarakat Buton.

Hukum *bhinci-bhinciki kuli* merupakan pokok adat dan dasarnya. Dan dinyatakan pula bahwa adat istiadat Buton itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikian pula *sara* di Buton itu berdasarkan agama Islam. Karenanya, *sara* di Buton itu adalah sara Allah SWT dan sara Nabi SAW, (Turi, 2007, hlm. 156).

Makna *bhinci-bhinciki kuli* jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan adalah saling takut, saling malu, saling segan dan saling insyaf. Hal ini sangat relevan diterapkan dalam suatu organisasi/kelompok masyarakat. Walaupun dalam lembag ada atasan, ada bawahan dan ada peserta personil lainnya atau terdapat berbagai personil, berbagai suku dan agama, tingkat umur dan keangkatannya, tetapi yang ditakuti, dimalui, disegani, bahkan diinsyafi adalah Tuhan Yang Maha Esa di atas segalanya.

PENUTUP

Pemimpin di Kota Baubau telah mengimplementasikan budaya *pomae-maeaka* yaitu memiliki rasa takut atau malu jika melanggar peraturan. Kepemimpinan yang mengusung *pomae-maeaka* tidak lain dilandaskan pada moralitas yang kokoh. Pemimpin benar-benar mencitrakan dirinya sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia yang layak diteladani. Pemimpin telah mengimplementasikan *popia-piara* (saling memelihara, mencintai atau saling mengabdikan). Saling memelihara dimaksudkan bahwa sesama pimpinan, karyawan dan staf serta masyarakat dalam melaksanakan aktivitas selalu memelihara kebersamaan, persatuan, nama baik organisasi, serta nama baik pimpinan.

Pemimpin telah mengimplementasikan *pomaa-masiakayaitu* saling menyayangi dan saling mencintai. Nilai-nilai *pomaa-masiaka* (saling menyayangi) memengaruhi pelaksanaan kepemimpinan misalnya antara anggota kelompok dengan anggota lainnya, bawahan dengan atasan, dan kasih sayang anak kepada orang tua. Kasih sayang perlu dimiliki oleh semua orang, dalam hal ini seorang pemimpin. Pemimpin telah mampu bersimpati dan memberikan empati, dan mengulurkan tangan. Dengan kasih sayang seorang pemimpin akan berkeliling untuk melihat satu persatu keadaan rakyatnya. Adakah di antara mereka yang kekurangan gizi, sakit tetapi tidak mampu berobat, terlilit hutang yang tidak mampu dibayar, sehingga pemimpin itu menjadi orang pertama yang selalu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya.

Pemimpin telah mengimplementasikan *poangka-angkataaka* (saling menghargai). *Poangka-angkataaka* adalah saling menghargai satu sama lain di antara

para personil organisasi. Wujud dari sikap menghargai tampak pada perilaku setiap personil yaitu ketika personil organisasi tidak hadir dalam melaksanakan tugas, apakah karena sakit atau berhalangan hadir karena urusan penting lainnya, mereka selalu menyampaikan informasi terlebih dahulu, baik disampaikan secara lisan, tertulis kepada pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2007). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bennis, W. & Nanus, B, (2003), *Leaders, strategies for taking charge*, New York: Harper Collins Publisher.
- Ciulla, J. B. 2003. *The ethics of leadership*. Singapore: Replika Press.
- Colquitt, J. & Lepine, J. (2009). *Organizational behavior: Improving performance and Commitment in the workplace*. New York: Mcgraw Hill.
- Effendy, (2009). *Pergeseran kepemimpinan desa, kharismatik, paternalistik, otokratik, demokratik*. Bandung: CV. Indra Prhasta.
- Geertz, C. (1973). *Interpretation of cultures*. New York: Basic Boks.
- Koentjaraningrat, (1985). *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kreitner, R. (2008). *Organizational behavior*. New York: Mcgraw Hill.
- Ndraha, T. (2005). *Budaya Organisasi*. Malang: Rineka Cipta.
- Turi, L. (2007). *Esensi kepemimpinan "Bhinciki-Bhinciki Kuli: Suatu tinjauan budayak epemimpinan lokal nusantara*. Kendari: Khazanah Nusantara.
- Yulk, G. (2006). *Leadership in organization*. New Jersey: Pearson.
- Wagner, J. A. & Hollenbeck, J. R. (2005). *Management of organizational behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

